

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PULAU SULAWESI**

RINGKASAN SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1)
pada Program Studi Akuntansi**



ALDILA BERLIANA PUTRI

111629241

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA

YOGYAKARTA

AGUSTUS 2020

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PULAU SULAWESI

Dipersiapkan dan disusun oleh:

ALDILA BERLIANA PUTRI

No Induk Mahasiswa: 111629241

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 21 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing I



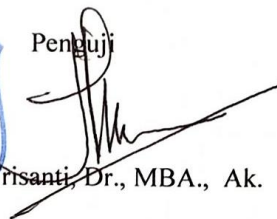
Baldric Siregar, Dr., MBA., CMA., Ak., CA.

Pembimbing II



Prima Rosita Arini Setyaningsih, SE., M.Si., Ak.

Penguji



Theresia Trisanti, Dr., MBA., Ak.

Yogyakarta, 21 Agustus 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua




Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PULAU SULAWESI

Aldila Berliana Putri

Program Studi Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Sulawesi. Faktor-faktor tersebut meliputi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Belanja Desa, Belanja Modal, Produk Domestik Regional Bruto, dan Jumlah Penduduk. Sampel yang digunakan yaitu kabupaten di Pulau Sulawesi tahun 2016 hingga tahun 2018. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari arsip data Badan Pusat Statistik. Analisis Regresi Berganda digunakan sebagai metode dalam penelitian ini dan diolah menggunakan SPSS versi 25. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu, 1) Dana Desa tidak berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat Pulau Sulawesi, 2) Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat Pulau Sulawesi, 3) Belanja Desa tidak berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat Pulau Sulawesi, 4) Belanja Modal tidak berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat Pulau Sulawesi, 5) Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat Pulau Sulawesi, 6) Jumlah Penduduk berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat Pulau Sulawesi.

Kata Kunci: Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Belanja Desa, Belanja Modal, Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Kesejahteraan Masyarakat.

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PULAU SULAWESI**

Aldila Berliana Putri

Program Studi Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that affect the community welfare on the island of Celebes. These factors are Village Funds, Village Funds Allocation, Village Expenditures, Capital Expenditures, Gross Regional Domestic Product, Total of Population. The sample of this study is the districts on the island of Celebes on 2016 until 2018. This study use the secondary data obtained from the archive of BPS-Statistics Indonesia. Multiple Regression Analysis is the method of this study and processed through SPSS 25. The result of this study are: 1) Village Funds has no positive effect on community welfare, 2) Village Funds Allocation has no positive effect on community welfare, 3) Village Expenditures has no positive effect on community welfare, 4) Capital Expenditures has no positive effect on community welfare, 5) Gross Regional Domestic Product has positive effect on community welfare, 6) Total of Population has negative effect on community welfare.

Keywords: Village Funds, Village Funds Allocation, Village Expenditures, Capital Expenditures, Gross Regional Domestic Product, Total of Population, Community Welfare.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Secara hirarki, Indonesia memiliki berbagai tingkatan yang dimulai dari Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota), dan Pemerintah Pusat. Dengan mempertimbangkan luas wilayah Indonesia, jumlah penduduk dan hal tersebut, Indonesia menerapkan regulasi tentang desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Regulasi terbaru mengenai hal tersebut yaitu Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kedua regulasi tersebut mengatur tentang pembagian wewenang yang diperoleh daerah dalam mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

Dalam hirarki pemerintahan Indonesia, yang berada pada posisi terendah adalah Desa. Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil di Indonesia. Peraturan tentang Desa secara khusus dibahas dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Dengan mengacu pada undang-undang tersebut, pemerintah melakukan beberapa kebijakan untuk meraih cita-cita bangsa Indonesia dalam mensejahterakan masyarakat. Alokasi Dana Desa dan Dana Desa merupakan bantuan pendanaan yang diterima oleh Desa sebagai wujud atas kebijakan tersebut.

Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan melihat data banyaknya jumlah penduduk Indonesia, maka dana yang diperoleh tentu tidak akan cukup apabila hanya menjadi konsumsi jangka pendek untuk masyarakat. Dana tersebut perlu dibelanjakan menjadi aset tetap atau dialokasikan ke dalam biaya pengadaan program-program kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jika dana tersebut dikelola

STIE-YKPN Yogyakarta

dan dibelanjakan dengan tertib dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing Desa, maka akan meningkatkan potensi desa tersebut sesuai dengan kemampuannya. Potensi desa yang diasah akan meningkat dan diharapkan diikuti dengan peningkatan produktivitas.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan PDRB sebagai nilai tambah bruto (*gross value added*) yang dihasilkan dari perekonomian suatu wilayah. PDRB Pulau Sulawesi didukung oleh 3 sektor utama yaitu sektor pertanian, pertambangan dan perdagangan. Pertumbuhan ekonomi digambarkan dengan kegiatan perekonomian yang berkembang dan menyebabkan peningkatan produksi barang dan jasa serta meningkatkan kesejahteraan (Nuraini, 2017).

Dijelaskan dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial sebagai kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan dapat melakukan pengembangan diri sehingga mampu melantaskan kapasitas sosialnya. Masyarakat yang memiliki kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya dapat dikatakan sebagai masyarakat sejahtera. Berikut ini merupakan gambaran kesejahteraan masyarakat di Pulau Sulawesi:

Tabel 1.1
IPM Pulau Sulawesi

Provinsi	IPM		
	2016	2017	2018
Sulawesi Utara	71,05	71,66	72,20
Sulawesi Tengah	67,47	68,11	68,88
Sulawesi Selatan	69,76	70,34	70,90
Sulawesi Tenggara	69,31	69,86	70,61
Gorontalo	66,29	67,01	67,71
Sulawesi Barat	63,60	64,30	65,10

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020)

Kesejahteraan masyarakat Pulau Sulawesi dari tahun 2016 – 2018 mengalami peningkatan. IPM Pulau Sulawesi pada tahun tersebut termasuk dalam golongan IPM Sedang. Kesenjangan ekonomi masih tampak di antara wilayah Provinsi di Pulau Sulawesi, terutama Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Barat tertinggal dari segi infrastruktur jika dibandingkan dengan provinsi yang lainnya. Tidak meratanya pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di Pulau Sulawesi juga mempengaruhi persebaran penduduk. Jumlah penduduk terbanyak terdapat pada Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki fasilitas dan ruang yang lebih memadai. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perlu didukung dengan fasilitas publik dan sarana prasarana yang cukup.

Fenomena peningkatan kesejahteraan masyarakat di Pulau Sulawesi menarik perhatian penulis untuk mengobservasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi dan bagaimana pengaruhnya. Dari pemaparan di atas, penulis akan melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Sulawesi”**. Skripsi ini akan meneliti beberapa faktor yang diprediksi memiliki pengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Sulawesi.

Rumusan Masalah

Faktor-faktor yang diprediksi memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat telah dibahas pada pemaparan latar belakang pada sub bab sebelumnya. Faktor-faktor tersebut meliputi, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Belanja Desa, Belanja Modal, PDRB, dan Jumlah Penduduk. Sebagai upaya untuk membatasi penelitian agar lebih fokus dan terarah, maka

diperlukan rumusan masalah. Di bawah ini adalah rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Apakah Dana Desa berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi?
2. Apakah Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi?
3. Apakah Belanja Desa berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi?
4. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi?
5. Apakah Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi?
6. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan membahas dan menganalisis faktor-faktor yang ada pada rumusan masalah yang telah dipaparkan. Analisis pada penelitian ini dilakukan untuk membuktikan apakah faktor-faktor di atas memiliki pengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi. Hasil yang didapatkan dari analisis yang dilakukan diharapkan dapat mencapai tujuan-tujuan berikut ini:

1. Mengetahui pengaruh Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi.
2. Mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi.

3. Mengetahui pengaruh Belanja Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi.
4. Mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi.
5. Mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi.
6. Mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori Keagenan menjelaskan hubungan secara kontrak antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Jensen dan Meckling (1976) menguraikan tentang hubungan keagenan antara prinsipal yang melibatkan agen melakukan tugas dan layanan atas nama prinsipal dengan melibatkan agen dalam pelimpahan sebagian hak pengambilan keputusan. Teori keagenan pada konteks penelitian ini diasumsikan dengan Pemerintah Daerah selaku agen sedangkan Pemerintah Pusat selaku prinsipal. Pemerintah Pusat memasrahkan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri.

Desentralisasi Fiskal

Definisi Desentralisasi Fiskal dijelaskan dalam UU Nomor 33 tahun 2004 memuat, yaitu merupakan proses Pemerintah pusat melimpahkan kewenangan fiskal kepada daerah otonom untuk mengelola urusan-urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Desentralisasi Fiskal ditujukan untuk menciptakan kemandirian di

daerah. Kemandirian tersebut tercermin dalam kewenangan daerah untuk mengatur dan mengalokasikan pendanaan yang disesuaikan pada kebutuhan daerah masing-masing. Adanya Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah mendorong Pemerintah Daerah melakukan eksplorasi kemampuan dari daerahnya sendiri. Hal ini akan sangat efektif untuk mengetahui potensi masing-masing daerah karena daerah dapat menyesuaikan pembangunan sesuai dengan prioritasnya.

Desa

Negara Kesatuan Republik Indonesia ingin melakukan pembangunan Indonesia bersama-sama dengan Desa. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dibuat dengan maksud memberikan pengukuhan dan pengaturan terhadap Desa oleh NKRI. Satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki garis wilayah dan memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya merupakan definisi Desa menurut undang-undang. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, termasuk mengelola serta mengurus keuangan Desa. Dijelaskan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa merupakan urusan pemerintahan yang dinilai dengan uang atau barang yang berkenaan dengan penunaian hak dan kewajiban Desa. Tahap pengelolaan Keuangan Desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Dana Desa

Dana Desa merupakan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diserahkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

STIE-YKPN Yogyakarta

(APBD). Dana Desa diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Berdasarkan pada aturan yang tercantum dalam undang-undang, Dana Desa harus diselenggarakan secara tertib dan taat pada peraturan dengan memperhatikan keadilan untuk masyarakat setempat. Penyusunan Anggaran Dana Desa diselenggarakan menggunakan prinsip perundang-undangan oleh Bendahara Umum Negara.

Alokasi Dana Desa

Dana Perimbangan dalam UU Nomor 33 tahun 2004 didefinisikan sebagai dana dalam APBN yang diperuntukkan kepada daerah dengan tujuan memberikan pendanaan pada pelaksanaan Desentralisasi. Alokasi Dana Desa adalah bagian dari Dana Perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAU). Besaran Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Alokasi Dana Desa digunakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Belanja Desa

Belanja Desa adalah kewajiban desa yang ditunaikan melalui pengeluaran rekening desa pada satu tahun anggaran tanpa diperoleh pembayarannya kembali oleh desa (Permendagri No 20 Tahun 2018). Belanja desa digunakan dengan maksud untuk mendanai penyelenggaraan kegiatan desa. Belanja Desa dapat dibedakan menjadi kelompok berdasarkan jenis dan bidang.

Pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tertulis bahwa Belanja Desa dikeluarkan untuk prioritas pemenuhan kebutuhan pembangunan yang disetujui

STIE-YKPN Yogyakarta

dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa adalah yang dimaksud dengan kebutuhan pembangunan.

Belanja Modal

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018, Belanja Modal adalah anggaran yang dikeluarkan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memiliki usia manfaat yang tidak kurang dari satu tahun periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi yang ditetapkan. Perolehan tanah, peralatan, gedung atau bangunan, pembangunan fasilitas publik, dan aset tidak berwujud merupakan penggunaan dari Belanja Modal. Kegiatan operasional satuan kerja dan kegiatan masyarakat difasilitasi dengan aset-aset tersebut.

Pada PMK dijelaskan bagaimana proses penetapan Belanja Modal dengan menggunakan kriteria kapitalisasi. Definisi Kapitalisasi pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sebuah cara, proses, kegiatan mengkapitalkan. Dalam akuntansi, kapitalisasi aset adalah ketika pengeluaran yang terjadi dalam rangka perolehan aset dibukukan sebagai aset, bukan sebagai beban.

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang dihasilkan dari perekonomian suatu wilayah (Badan Pusat Statistik, 2020). Bank Indonesia (BI) mendefinisikan PDRB sebagai indikator penting untuk melihat keadaan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku. Rasio

antara PDRB menurut harga konstan dan harga berlaku, yang disebut indeks harga implisit, dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga.

Jumlah Penduduk

Penduduk di Indonesia adalah seluruh warga yang berkedudukan di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau yang kurang dari enam bulan tetapi memiliki niat untuk tinggal di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2020). Jumlah Penduduk di Indonesia mengalami pertumbuhan dan selalu meningkat setiap tahun. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah individu dalam populasi yang bisa dihitung. Data jumlah penduduk didapatkan dari Sensus Penduduk yang dilakukan oleh BPS satu kali dalam setiap sepuluh tahun.

Penghitungan proyeksi jumlah penduduk dibedakan menjadi metode matematik dan metode komponen. Kedua metode tersebut menghasilkan angka yang sama apabila digunakan pada jangka pendek. Namun untuk jangka panjang, metode komponen menjadi metode yang relatif lebih baik karena mempertimbangkan determinan seperti kematian, kelahiran, dan perpindahan (Badan Pusat Statistik, 2010).

Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Sosial adalah keadaan tercukupinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat memiliki kehidupan yang layak dan mampu melakukan pengembangan atas dirinya, sehingga dapat menunaikan kapasitas sosialnya. Menurut Badrudin (2012), hubungan antara kesejahteraan dengan pilihan sosial secara objektif yang diperoleh dengan cara menjumlahkan kepuasan individu dalam masyarakat disebut dengan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan

STIE-YKPN Yogyakarta

masyarakat ditunjukkan dengan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan ekonomi, kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar, memperluas ketersediaan pilihan sosial (Todaro dan Smith, 2006).

Pengembangan Hipotesis

Tujuan dan pedoman penggunaan Dana Desa adalah untuk membiayai Pembangunan Daerah. IPM yang semakin meningkat mengindikasikan pencapaian pembangunan manusia lebih baik (Badan Pusat Statistik, 2020). Penelitian mengenai Dana Desa oleh Sunu dan Utama (2019) mendapatkan kesimpulan bahwa Dana Desa memiliki pengaruh positif pada Kesejahteraan Masyarakat. Peningkatan pemberian Dana Desa dari tahun ke tahun bersamaan dengan tingkat IPM Pulau Sulawesi yang tiap tahun juga meningkat. Penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan asas dan pedoman pelaksanaan Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Berikut adalah hipotesis untuk variabel Dana Desa:

H1: Dana Desa berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi.

Rusydi (2012), M. Rimawan dan Aryani (2019), dan Fathony dan Sopian (2019) menemukan hasil bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat. Hasil dan temuan dari penelitian sebelumnya menunjukkan hubungan yang positif antara Alokasi Dana Desa dengan Kesejahteraan Masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa yang meningkat, akan diiringi dengan peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Berikut merupakan hipotesis yang dibuat untuk variabel Alokasi Dana Desa:

H2: Alokasi Dana Desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi.

Sesuai yang tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Desa. Penelitian Dewi dan Irama (2018) menemukan kesimpulan bahwa Pendapatan Desa dan Alokasi Dana Desa memiliki hubungan yang searah (positif) terhadap Belanja Desa. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa peningkatan Alokasi Dana Desa akan meningkatkan Belanja Desa. Berikut adalah hipotesis yang dibentuk untuk variabel Belanja Desa:

H3: Belanja Desa berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi.

Berdasarkan pada realisasi anggaran, Belanja Modal dialokasikan oleh pemerintah pada pembangunan infrastruktur untuk masyarakat. Infrastruktur dan fasilitas publik yang tercukupi akan memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas. Hal tersebut dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan diikuti dengan peningkatan kesejahteraan manusia. Mirza (2012), Zebua dan Adib (2014), Arini S. (2016), selaras dengan kesimpulan Belanja Modal berpengaruh positif pada Kesejahteraan Masyarakat. Kesimpulan yang didapat dari penelitian terdahulu memiliki arti bahwa bertambahnya alokasi Belanja Modal akan diiringi dengan peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Berikut adalah hipotesis untuk variabel Belanja Modal pada kesejahteraan masyarakat:

H4: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi.

PDRB dihitung dengan komponen konsumsi pemerinyah, konsumsi akhir rumah tangga, perubahan modal, inventori, dan kegiatan ekspor dan impor (Badan Pusat Statistik, 2020). BPS menyatakan bahwa salah satu kegunaan laju pertumbuhan PDRB adalah untuk mengukur pertumbuhan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional. Menurut Badan Pusat Statistik (2020), dampak dari pembangunan suatu daerah/negara adalah tercapainya pembangunan manusia. Menurut Arini S. (2016), peningkatan *output* atau penghasilan masyarakat akan mengubah daya beli dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Beberapa penelitian milik Mirza (2012), Setiawan dan Budiana (2015), dan Manggala (2019) mendapatkan kesimpulan penelitian bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Berikut adalah hipotesis untuk variabel PDRB:

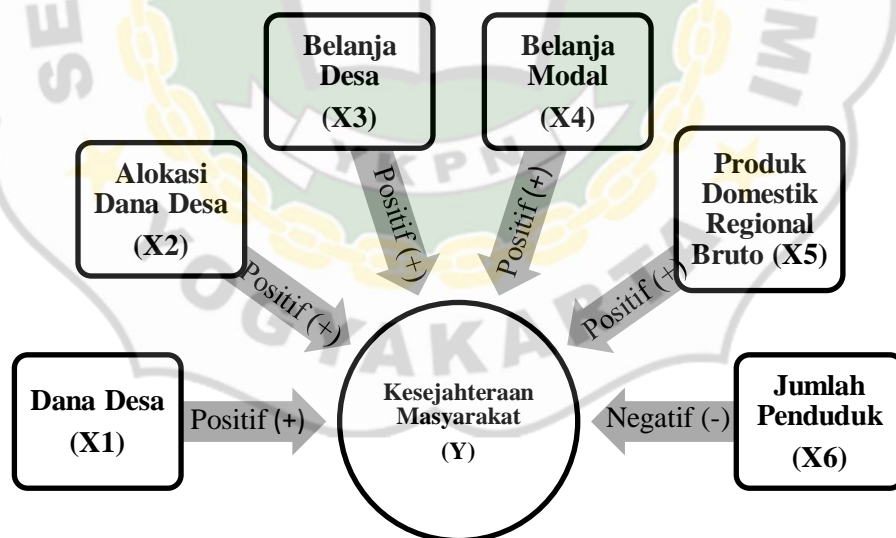
H5: Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi.

Jumlah penduduk yang tinggi dilihat mampu mempengaruhi pembangunan suatu negara. Apabila seluruh penduduk di Indonesia mampu memiliki produktivitas yang tinggi, tentu akan sangat membantu pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Suparmoko (2002) menyatakan bahwa salah satu penghambat pembangunan adalah tidak seimbangnya jumlah penduduk dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Adioetomo (2010) dalam bukunya membahas teori konfusius yang menganggap bahwa luas tanah dengan jumlah penduduk memiliki proporsi yang ideal. Menurutnya, turunnya standar kehidupan masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang besar. Penelitian Stefandy *et al.* (2014) yang membuktikan bahwa

tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, semakin banyaknya jumlah penduduk akan menciptakan tuntutan pelayanan sosial yang semakin besar kepada pemerintah. Jumlah penduduk Indonesia yang tinggi memerlukan dana dan fasilitas yang tinggi pula. Apabila dana yang digunakan berjumlah tetap namun jumlah penduduk meningkat, maka akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, meningkatnya jumlah penduduk akan diikuti dengan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah hipotesis untuk variabel jumlah penduduk:

H6: Jumlah Penduduk berpengaruh negatif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi.

Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dalam penelitian ini. Lokasi penelitian ini terletak pada Pulau Sulawesi, Indonesia. Penelitian ini

STIE-YKPN Yogyakarta

menghabiskan waktu dari bulan Februari – Agustus 2020. Kabupaten pada Pulau Sulawesi merupakan unit analisis pada penelitian ini.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini memiliki populasi yang mencakup seluruh kabupaten di Indonesia. Kabupaten yang terletak pada Pulau Sulawesi menjadi sampel penelitian ini dengan periode tahun 2016 – 2018.

Teknik Pengambilan Sampel

Purposive sampling menjadi metode yang dipilih oleh peneliti dalam milih sampel yang tepat. Di bawah ini adalah kriteria sampel penelitian ini:

1. Kabupaten di Pulau Sulawesi yang mendapatkan aliran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2016 – 2018.
2. Tahun yang digunakan adalah tahun pada saat kebijakan Dana Desa sudah diterapkan.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Untuk memperoleh data sekunder yang akan digunakan, peneliti memperoleh data arsip dokumentasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS menyediakan data melalui publikasi yang dapat diakses pada *website* resmi BPS Indonesia dan BPS masing-masing Provinsi di Pulau Sulawesi.

Tabel 3.2
Variabel dan Pengukuran

Variabel	Pengukuran	Satuan
Dana Desa (X1)	Dana Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Formula	Rupiah
Alokasi Dana Desa (X2)	Alokasi Dana Desa = (Persentase Klasifikasi Desa x Alokasi Dana Desa Kabupaten): Jumlah Desa menurut	Rupiah

STIE-YKPN Yogyakarta

Variabel	Pengukuran	Satuan
	klasifikasinya.	
Belanja Desa (X3)	Belanja Desa = Belanja pembangunan Desa (minimal 70%) + Belanja Gaji dan Pegawai Desa (maksimal 30%)	Rupiah
Belanja Modal (X4)	Belanja Modal = Kenaikan bersih dalam aset tetap + Beban Penyusutan	Rupiah
PDRB (X5)	$PDRB = C + G + GFCF + \Delta Invent + X - M$	Rupiah
Jumlah Penduduk (X6)	$P_t = P_0 + (L - M) + (MigIn - MigOut)$	Jiwa
Kesejahteraan Masyarakat (Y)	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$	Persen (%)

Metode dan Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan metode Analisis Regresi Berganda berbasis *Ordinary Least Square* (OLS) atau Metode Kuadrat Terkecil. Alat pengolahan data yang akan digunakan adalah SPSS versi 25.0. Data yang diperoleh akan melewati pengujian Asumsi Klasik dan pengujian Hipotesis.

Uji Normalitas

Untuk mendeteksi bahwa distribusi dalam keadaan normal atau tidak, dilakukan pengujian menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov*. Pada pengujian ditentukan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05. Berikut adalah hipotesis yang digunakan dalam Uji Normalitas:

H_0 : Residual berdistribusi normal.

H_A : Residual tidak berdistribusi normal

Untuk menentukan data berdistribusi normal atau tidak, Nilai *Asymp. Sig. 2-tailed* dibandingkan dengan tingkat signifikansi (α) dengan kriteria sebagai berikut:

1. Apabila *Asymp. Sig. 2-tailed* > 0,05, maka H_0 tidak ditolak.

2. Apabila *Asymp. Sig. 2-tailed* $< 0,05$, maka H_0 ditolak.

Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui keberadaan multikolinearitas, dapat dilakukan dengan *Collinearity Diagnostic* pada SPSS dengan memperhatikan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Hipotesis yang digunakan dalam Uji Multikolinearitas adalah sebagai berikut:

H_0 : tidak terdapat masalah multikolinearitas.

H_A : terdapat masalah multikolinearitas.

Penentuan apakah terdapat masalah multikolinearitas dengan menggunakan Uji VIF dan *Tolerance* ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Apabila nilai VIF < 10 atau *Tolerance* $> 0,1$, maka H_0 tidak ditolak.
2. Apabila nilai VIF > 10 atau *Tolerance* $< 0,1$, maka H_0 ditolak.

Uji Heteroskedastisitas

Dalam pengujian asumsi klasik, homoskedastisitas atau kesamaan jenis pada data merupakan salah satu asumsi yang harus terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut, hasil yang diharapkan pada pengujian ini adalah tidak terdapat heteroskedastisitas dalam data. Berikut adalah hipotesis dalam pengujian heteroskedastisitas:

H_0 : tidak terdapat masalah heteroskedastisitas

H_A : terdapat masalah heteroskedastisitas

Cara untuk menentukan apakah terjadi heteroskedastisitas dalam data adalah dengan membandingkan hasil regresi dengan α menggunakan ketentuan di bawah ini:

1. Apabila *P value* $> \alpha$, maka H_0 tidak ditolak.
2. Apabila *P value* $< \alpha$, maka H_0 ditolak.

Uji Autokorelasi

Korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode n dengan kesalahan pada periode $n-1$ diuji dengan Uji Autokorelasi. Di bawah ini merupakan hipotesis untuk uji autokorelasi:

H_0 : tidak terdapat autokorelasi

H_A : terdapat autokorelasi

Dalam penelitian ini, pengujian autokorelasi menggunakan metode *Durbin Watson* (Uji DW) yang dihitung dengan d_U dan d_L (Ghozali, 2018). Keputusan ada tidaknya korelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Keputusan *Durbin Watson*

Nilai DW	Keputusan
$0 < DW < d_L$	Menolak $H_0 \rightarrow$ Terdapat korelasi positif
$d_L < DW < d_U$	Menolak $H_0 \rightarrow$ Tidak terdapat keputusan
$d_U < DW < 4-d_U$	Tidak menolak $H_0 \rightarrow$ Tidak terdapat autokorelasi
$4-d_U < DW < 4-d_L$	Menolak $H_0 \rightarrow$ Tidak terdapat keputusan
$4-d_L < DW < 4$	Menolak $H_0 \rightarrow$ Terdapat korelasi negatif

(Sumber: Widarjono, 2007)

Uji Hipotesis

Enam variabel independen pada penelitian ini akan dianalisis hubungannya terhadap satu variabel dependen. Berikut merupakan persamaan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini.

$$KM = \alpha + \beta_1 DD + \beta_2 ADD + \beta_3 BD + \beta_4 BM + \beta_5 PDRB - \beta_6 JP + \varepsilon$$

Keterangan:

- KM = Kesejahteraan Masyarakat
- DD = Dana Desa
- ADD = Alokasi Dana Desa
- BD = Belanja Desa
- BM = Belanja Modal
- PDRB = Produk Domestik Regional Bruto
- JP = Jumlah Penduduk
- α = konstanta
- β = *slope*/ koefisien

ε = error

Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Berikut adalah hipotesis simultan pada penelitian ini:

H₀: Tidak terdapat variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen.

H_A: Paling tidak terdapat satu variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen.

Selain melakukan perbandingan pada nilai F kritis dan F hitung, keputusan juga dapat diambil dengan membandingkan nilai Sig. dengan α . Ketentuan perbandingannya adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai Sig. < α , maka H₀ ditolak.
2. Jika nilai Sig. > α , maka H₀ tidak ditolak.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Hubungan variabel independen terhadap variabel dependen dapat diketahui seberapa besar pengaruhnya dengan melakukan pengujian koefisien determinasi.

Koefisien Determinasi dinyatakan dalam bentuk persentase (%). Berikut merupakan rumus Koefisien Determinasi (Algifari, 2010):

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd = Koefisien Determinasi

r^2 = Koefisien korelasi berganda

Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial diketahui dengan melakukan pengujian Hipotesis Parsial (Uji t). Hipotesis parsial dituliskan ke dalam bentuk statistik sebagai berikut:

H1: Dana Desa berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi.

$H_0: \beta_1 \leq 0 \rightarrow$ Dana Desa tidak berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi.

$H_A: \beta_1 > 0 \rightarrow$ Dana Desa berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi.

H2: Alokasi Dana Desa berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi.

$H_0: \beta_2 \leq 0 \rightarrow$ Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi.

$H_A: \beta_2 > 0 \rightarrow$ Dana Desa berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi.

H3: Belanja Desa berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi.

$H_0: \beta_3 \leq 0 \rightarrow$ Belanja Desa tidak berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi.

$H_A: \beta_3 > 0 \rightarrow$ Belanja Desa berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi.

H4: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi.

$H_0: \beta_4 \leq 0 \rightarrow$ Belanja Modal tidak berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi.

$H_A: \beta_4 > 0 \rightarrow$ Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi.

H5: Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi.

$H_0: \beta_5 \leq 0 \rightarrow$ Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi.

$H_A: \beta_5 > 0 \rightarrow$ Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi.

H6: Jumlah Penduduk berpengaruh negatif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi.

$H_0: \beta_6 \geq 0 \rightarrow$ Jumlah Penduduk tidak berpengaruh negatif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi.

$H_A: \beta_6 < 0 \rightarrow$ Jumlah Penduduk berpengaruh negatif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi.

Apabila perhitungan dilakukan menggunakan aplikasi SPSS, maka dapat dilakukan perbandingan menggunakan tingkat signifikansi (α). Penelitian ini menggunakan nilai α sebesar 5%. Berikut adalah ketentuan perbandingan antara *Sig.* dengan α :

1. Jika *Sig.* $< \alpha$, maka H_0 ditolak.
2. Jika *Sig.* $> \alpha$, maka H_0 tidak ditolak.

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Analisa Data

Analisa data pada bab ini menggunakan hasil pengolahan data yang dilakukan dengan Aplikasi SPSS versi 25. Berdasarkan pada Metode Penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, pengujian yang dilakukan pada penelitian ini

STIE-YKPN Yogyakarta

meliputi Analisa Deskriptif Data, Uji Asumsi Klasik, dan Uji Hipotesis. Analisa Data membahas tentang gambaran umum data dan interpretasi data sehingga data yang diperoleh dapat dijadikan informasi untuk mencapai tujuan penelitian.

Analisa Deskriptif Data

Berikut merupakan hasil dari analisis data secara deskriptif, dengan mengetahui nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata data, dan standar deviasi.

Tabel 4.4
Statistik Deskriptif Data

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
Dana Desa	Rp28.539.096.000	Rp307.010.528.000	Rp93.203.618.738	Rp47.261.799.077,56
Alokasi Dana Desa	Rp7.339.865.000	Rp126.470.776.000	Rp52.462.693.441	Rp21.168.204.312,86
Belanja Desa	Rp47.410.670.000	Rp386.140.817.000	Rp145.170.347.908	Rp61.156.106.117,24
Belanja Modal	Rp117.312.001.000	Rp501.965.376.000	Rp253.322.543.662	Rp82.701.079.826,33
Produk Domestik Regional Bruto	Rp853.000.000.000	Rp20.659.000.000.000	Rp6.255.866.666.667	Rp4.318.700.587.634,64
Jumlah Penduduk	32.307 jiwa	751.981 jiwa	230.056 jiwa	139.789,21 jiwa
Indeks Pembangunan Manusia	61,51 %	74,97 %	66,97 %	2,67 %

(Sumber: *Output 2020*)

Berdasarkan pada hasil analisis deskriptif data pada tabel 4.1, terlihat bahwa rata-rata Dana Desa yang diperoleh Pulau Sulawesi selama 2016 – 2018 adalah sebesar Rp93.203.618.738. Standar Deviasi Dana Desa adalah sebesar Rp47.261.799.077,56. Dana Desa terendah selama jangka waktu tersebut yaitu Rp28.539.096.000 terjadi pada tahun 2016 di Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan Dana Desa tertinggi diperoleh oleh Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018.

Alokasi Dana Desa Pulau Sulawesi pada tahun 2016 – 2018 memiliki rata-rata Rp52.462.693.441 dengan standar deviasi sebesar Rp21.168.204.312,86. Alokasi Dana Desa terendah diwakili oleh Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara pada tahun 2016. Alokasi Dana Desa tertinggi terjadi tahun 2018 yang diwakili oleh Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

Belanja Desa pada Pulau Sulawesi memiliki rata-rata Rp145.170.347.908 selama tahun 2016 – 2018. Belanja Desa memiliki Standar Deviasi sebesar Rp61.156.106.117,24. Belanja Desa terendah terdapat pada Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat pada tahun 2016. Belanja Desa tertinggi terdapat pada Kabupaten Bone Sulawesi Selatan pada tahun 2018.

Belanja Modal rata-rata sebesar Rp253.322.543.662 selama tahun 2016 – 2018. Standar Deviasi Belanja Modal adalah sebesar Rp82.701.079.826,33. Belanja Modal terendah terjadi pada tahun 2018 pada Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Belanja Modal tertinggi terjadi pada tahun 2016 di Kabupaten Luwu Timur.

PDRB rata-rata adalah sebesar Rp6.255.866.666.667 dengan standar deviasi sebesar Rp4.318.700.587.634,64. PDRB terendah terjadi pada tahun 2016 di Kabupaten Konawe Kepulauan dan PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2018 di Kabupaten Bone.

Pulau Sulawesi memiliki rata-rata jumlah penduduk sebesar 230.056 jiwa. Standar Deviasi Jumlah Penduduk adalah sebesar 139.789,21. Jumlah penduduk terendah terjadi pada tahun 2016 di Kabupaten Konawe Kepulauan dengan jumlah 32.307 jiwa, sedangkan jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kabupaten Gowa pada tahun 2018 dengan jumlah 751.981 jiwa.

IPM Pulau Sulawesi juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rata-rata IPM pada tahun 2016 – 2018 adalah sebesar 66,97 yang masuk dalam kategori IPM sedang. Standar Deviasi IPM adalah sebesar 2,67 %. IPM terendah Pulau Sulawesi sebesar 61,51 untuk Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2016. IPM terendah dari Pulau Sulawesi masih berada pada kategori IPM Sedang. IPM tertinggi yaitu sebesar 74,97 yang sudah masuk ke dalam kategori IPM tinggi diwakili oleh Kabupaten Minahasa pada tahun 2018.

Uji Normalitas

Tabel 4.5
Uji Kolmogorov Smirnov

	<i>Unstandardized Residual</i>
N	145
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	.200

(Sumber: *Output* 2020)

Dihasilkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 pada pengujian normalitas dengan *Kolmogorov Smirnov*. Nilai tersebut tidak lebih kecil dari nilai signifikansi (0,05) yang berarti bahwa H_0 tidak ditolak. Kesimpulan yang didapat yaitu residual data berdistribusi normal. Data yang memiliki nilai residual berdistribusi normal berarti lolos dalam uji normalitas dalam uji asumsi klasik.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.6
Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
Dana Desa	0.157	6.352
Alokasi Dana Desa	0.307	3.260
Belanja Desa	0.102	9.841

Variabel	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	VIF
Belanja Modal	0.617	1.621
Produk Domestik Regional Bruto	0.312	3.204
Jumlah Penduduk	0.352	2.844

(Sumber: *Output* 2020)

Nilai *tolerance* untuk keenam variabel independen besarnya tidak kurang dari 0,1 dan nilai *VIF* tidak lebih dari 10, maka keputusan yang diambil dalam uji multikolinearitas ini adalah tidak menolak H_0 . Kesimpulan yang dapat dibuat untuk keputusan tersebut adalah tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam penelitian ini. Dari kesimpulan tersebut, dapat diartikan bahwa uji multikolinearitas dalam uji asumsi klasik penelitian ini terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.7
Uji Glejser

Variabel	<i>Sig.</i>
Dana Desa	0.301
Alokasi Dana Desa	0.683
Belanja Desa	0.702
Belanja Modal	0.118
Produk Domestik Regional Bruto	0.682
Jumlah Penduduk	0.052

(Sumber: *Output* 2020)

Hasil Uji *Glejser* yang diperoleh di atas dibandingkan dengan nilai α 0,05. Dengan perbandingan tersebut dapat dilihat variabel memiliki nilai $Sig > \alpha$, maka dapat diambil keputusan H_0 tidak ditolak. Kesimpulannya adalah tidak terdapat heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Tabel 4.8
Uji Durbin Watson

Model	Durbin Watson
1	1,897

(Sumber: *Output 2020*)

Pengujian Autokorelasi menggunakan nilai *Durbin-Watson* dalam pengambilan keputusannya. Keputusan diambil menggunakan dasar pada Tabel 3.2. di atas. Sebelum pengambilan keputusan, diperlukan nilai d_L (batas bawah) dan d_U (batas atas). Nilai tersebut diperoleh dari tabel *Durbin-Watson* dengan *degree of freedom* (k, n) yaitu (6, 145). Nilai d_L adalah sebesar 1,6434 dan d_U sebesar 1,8154. Nilai *Durbin-Watson* yang diperoleh pada Tabel 4.5. memenuhi syarat dalam perhitungan dengan rumus $d_U < DW < 4-d_U$, maka keputusannya adalah menolak H_0 . Kesimpulan dari pengujian autokorelasi dalam penelitian ini adalah tidak terjadi autokorelasi.

Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Tabel 4.9
Uji F

	F	Sig.
<i>Regression</i>	10,420	.000

(Sumber: *Output 2020*)

Pengujian hiotesis simultan pada keenam variabel independen terhadap kesejahteraan masyarakat Pulau Sulawesi menghasilkan *Sig.* sebesar 0,000. Dengan membandingkan nilai *Sig.* 0,000 yang tidak lebih besar dari α 0,05, maka keputusannya adalah menolak H_0 . Dari keputusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa paling tidak terdapat satu variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Tabel 4.10
Uji R²

<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
0,312	0,282

(Sumber: *Output* 2020)

Pada tabel Uji R² di atas tercantum nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,282. Nilai tersebut memiliki arti bahwa variabel dependen dipengaruhi oleh variabel-variabel independen sebesar 28,2%. Sisanya yaitu 71,8% yang tidak dapat dibuktikan oleh variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini atau dapat diartikan bahwa variabel dependen dalam penelitian ini turut dipengaruhi oleh aspek di luar penelitian ini.

Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Variabel dependen dipengaruhi variabel independen dengan persentase pengaruh sebesar 28,2%. Masing-masing variabel independen telah diketahui pengaruhnya setelah pengujian hipotesis parsial (Uji t) yang telah dilakukan. Berikut adalah hasil dari pengujian hipotesis parsial dalam penelitian ini:

Tabel 4.11
Uji t

Variabel	B	<i>Std. Error</i>	T	<i>Sig.</i>
<i>(Constant)</i>	-33,082	26,090	-1,268	0,207
Dana Desa (X1)	0,129	1,397	0,092	0,926
Alokasi Dana Desa (X2)	-0,444	0,968	-0,458	0,648
Belanja Desa (X3)	1,525	2,240	0,681	0,497
Belanja Modal (X4)	0,260	0,733	0,354	0,724
Produk Domestik Regional Bruto (X5)	3,236	0,489	6,617	0,000
Jumlah Penduduk (X6)	-2,682	0,552	-4,860	0,000

(Sumber: *Output* 2020)

Persamaan Analisis Regresi Berganda berdasarkan pada *output* pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

$$KM = 0,129DD - 0,444ADD + 1,525BD + 0,260BM + 3,236PDRB - 2,682JP - 33,082 + 26,090$$

Berdasarkan pada pedoman pengambilan keputusan dengan nilai *Sig.* yang telah dibahas pada bab sebelumnya, berikut adalah keputusan yang didapat dari hasil pengujian di atas:

Tabel 4.12
Keputusan Uji Hipotesis

Variabel	Sig.	Keputusan
Dana Desa	0,926	<i>Sig.</i> > 0,05 = Tidak Menolak H ₀
Alokasi Dana Desa	0,648	<i>Sig.</i> > 0,05 = Tidak Menolak H ₀
Belanja Desa	0,497	<i>Sig.</i> > 0,05 = Tidak Menolak H ₀
Belanja Modal	0,724	<i>Sig.</i> > 0,05 = Tidak Menolak H ₀
PDRB	0,000	<i>Sig.</i> < 0,05 = Menolak H ₀
Jumlah Penduduk	0,000	<i>Sig.</i> < 0,05 = Menolak H ₀

Pembahasan

Pengujian hipotesis secara parsial (Uji t) telah membuktikan pengaruh keenam variabel independen terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Keputusan untuk hipotesis pertama adalah tidak menolak H₀. Dari hasil keputusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Dana Desa tidak berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi. Penelitian Lengkong dan Tasik (2018) dan Pasodung dan Tinangon (2017) dapat memberikan gambaran tentang penyelenggaraan Dana Desa yang masih belum sesuai dengan prioritas yang sudah ditetapkan. Fokus penggunaan Dana Desa masih terdapat pada pengembangan sarana dan prasarana daripada pembiayaan untuk pemberdayaan masyarakat. Kurangnya pemahaman dan sosialisasi Dana Desa kepada para pelaksana Dana Desa juga menjadi hambatan pelaksanaan Dana Desa.

Hasil pengolahan Uji Hipotesis Parsial (Uji t) mendapatkan keputusan bahwa Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat adalah tidak menolak H_0 . Kesimpulan dari keputusan tersebut adalah Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi. Penelitian Kusuma (2017) dan Karimah *et al* (2014) mendapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa terhambat oleh kurangnya partisipasi dari masyarakat sehingga tahap pengawasan, pertanggungjawaban, dan transparansi kurang maksimal. Kenyataan yang terdapat di lapangan menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Peningkatan kualitas pelaksana dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting untuk mengiringi peningkatan Alokasi Dana Desa yang meingkat setiap tahunnya agar tujuan dari Alokasi Dana Desa tidak tercapai dengan maksimal. Tidak maksimalnya penggunaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pulau Sulawesi juga dapat disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Kementerian PUPR (2015) menjelaskan tentang persebaran penduduk yang tidak merata di Pulau Sulawesi. Hal tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang tidak merata.

Pengujian Uji Hipotesis Parsial pada Belanja Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat diperoleh keputusan tidak menolak H_0 . Kesimpulannya yaitu Belanja Desa tidak berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi. Pada Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa, persentase Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa jauh lebih tinggi dibandingkan dalam Bidang Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat. Lebih dari 50% anggaran Belanja Desa digunakan untuk pembangunan desa pada setiap tahunnya.

Sedangkan rata-rata belanja pada bidang pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat tidak lebih dari 10% pada anggaran Belanja Desa. Hal tersebut menyebabkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia tidak dapat dilaksanakan dengan optimal.

Pengujian hipotesis parsial pada Belanja Modal terhadap Kesejahteraan Masyarakat di atas mendapatkan keputusan tidak menolak H_0 . Maka dari itu kesimpulannya yaitu Belanja Modal tidak berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi. Hubungan antara Belanja Modal dan IPM positif tetapi tidak signifikan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pengalokasian belanja modal sudah disertai kenaikan IPM namun belum maksimal. Dilihat dari Gambar 4.4, Rata-rata Belanja Modal Pulau Sulawesi jumlahnya menurun dari tahun 2016 – 2018. Penurunan alokasi untuk Belanja Modal menyebabkan berkurangnya pengaruh Belanja Modal terhadap kesejahteraan masyarakat Pulau Sulawesi. Pembangunan fasilitas publik yang merupakan wujud dari Belanja Modal memiliki kemungkinan tidak berpengaruh pada IPM tahun yang bersangkutan, namun berpengaruh terhadap tahun selanjutnya.

Pengolahan Uji Hipotesis Parsial mendapatkan hasil keputusan bahwa pengaruh PDRB terhadap Kesejahteraan Masyarakat adalah menolak H_0 . Dari keputusan tersebut, dapat ditarik kesimpulan yaitu PDRB berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi. Hasil tersebut didukung dengan penelitian milik Mirza (2012), Setiawan dan Budiana (2015), dan Manggala (2019) yang mendapat kesimpulan bahwa PDRB memiliki pengaruh positif terhadap IPM.

Keputusan pada uji t untuk variabel Jumlah penduduk terhadap kesejahteraan masyarakat Pulau Sulawesi adalah menolak H_0 . Dari keputusan tersebut, kesimpulannya yaitu Jumlah Penduduk berpengaruh negatif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sulawesi. Hasil yang diperoleh antara Jumlah penduduk dengan IPM pada penelitian ini searah dengan penelitian Astuti dan Astika (2016) yang mendapatkan hasil bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif pada kesejahteraan masyarakat. Teori Malthus (1820) menekankan pada pentingnya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan fasilitas dan daya dukung lingkungan. Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan apabila terjadi permintaan yang efektif. Permintaan yang efektif tersebut dapat ditingkatkan dengan pendistribusian yang adil dan memperluas perdagangan internal dan eksternal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah dilakukan pengolahan data dan pembahasan, diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang dibentuk sebelumnya. Berikut adalah kesimpulan dari penelitian ini:

1. Dana Desa tidak berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat Pulau Sulawesi.
2. Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat Pulau Sulawesi.
3. Belanja Desa tidak berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat Pulau Sulawesi.

4. Belanja Modal tidak berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat Pulau Sulawesi.
5. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat Pulau Sulawesi.
6. Jumlah Penduduk berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat Pulau Sulawesi.

Keterbatasan

Selama peneliti menyusun penelitian ini, ditemukan beberapa keterbatasan yang mempengaruhi proses penyusunan. Berikut adalah keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini:

1. Data realisasi anggaran beberapa wilayah observasi pada tahun tertentu tidak tersedia di BPS.
2. Tahun observasi yang digunakan hanya 3 tahun dikarenakan data pada BPS untuk tahun 2019 belum tersedia.

Saran

1. Bagi pihak pemangku kebijakan dapat menjadikan hasil dari penelitian ini sebagai evaluasi dan perbaikan untuk kebijakan selanjutnya.
2. Penyelenggaraan keuangan desa yang belum optimal dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman dan kapabilitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga diperlukan pelatihan, sosialisasi, dan pengawasan untuk perbaikan penyelenggaraan keuangan desa.
3. Penggunaan sampel pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik ini diharapkan dapat memperbanyak jumlah tahun observasi.

4. Penelitian selanjutnya yang menggunakan penelitian ini sebagai referensi diharapkan dapat mempertimbangkan seluruh dimensi dalam analisis faktor-faktor kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo, Sri Moertaningsih, dan Omas Bulan Samosir. 2010. Dasar-dasar Demografi. Jakarta: Salemba Empat
- Agus Widarjono. 2007. Ekonometrika Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Ekonisia FE UII.
- Algifari. 2010. Statistika Deskriptif untuk Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Arini S, Prima Rosita. (2016). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Kalimantan. JRAMB Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi UMB Yogyakarta. Volume 2. Nomor 2. 180 – 198.
- Astuti, Ida Paramita Ayu dan Ida Bagus Putra Astika. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi Bali. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Volume 17. Nomor 3. 2416 – 2446.
- Badrudin, Rudy. 2012. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Disertasi*. Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.
- Dewi, Ratna Sari dan Ova Novi Irama. (2018). Pengaruh Pendapatan Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Belanja Desa dan Kemiskinan. Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM). Volume 5. Nomor 2. 50 – 58.
- Dian, Priastiwi dan Herniwati Retno Handayani. (2019). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, dan PDRB terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah. Diponegoro Journal of Economics. Volume 1. Nomor 1. 159 – 169.
- Fathony, Aditya Ahmad dan Asep Sopian. (2019) Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi. Volume 10. Nomor 3. 41 – 57.

- Ghozali, I. 2018. Aplikasi Analisis *Multivariate SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. 2003. *Basic Econometrics. McGraw-Hill. New York*.
- Humairah dan Soraya Lestari. (2020). Analisis Pengaruh Anggaran Apbdes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Desa Lamceu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. *Journal of Economic Science*. Volume 6. Nomor 1. 26 – 35.
- Jensen Michael C. and William H. Meckling. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics*. Volume 3. Nomor 4. 305 – 360.
- Kusuma, Aji Ratna. (2017). Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrative Reform*. Volume 5. Nomor 2. 112 – 127.
- Kutner, M. H., C. J. Nachtsheim dan J. Neter. 2004. *Applied Linear Regression Models. Fourth Edition. New York: The McGraw Hill Company, Inc.*
- Lengkong, Victor P. K. dan Hizkia H. D. Tasik. (2018). Evaluasi Penggunaan Dana Desa dengan Instrumen Dimensi Pengukuran dan Pengelolaan Dana Desa (DP2D2) Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014). *Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi*. Volume 5. Nomor 1. 15 – 28.
- Malthus, Thomas. 1820. *Principles of Political Economy Considered with a View to their Applications*, London: William Pickering.
- Manggala, Gallyn Ditya. (2019). Pengaruh Dana Desa dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume 1. Nomor 1. 1 – 7.
- Mirza, Denni Sulistio. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006 – 2009. *Economics Development Analysis Journal*. Volume 1. Nomor 1. 1 – 15.
- Mulyadi, Subri. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muslihah, S., Hilda Octavana Siregar, dan Sriniyati. (2019). Dampak Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, dan Manajemen Bisnis*. Volume 7. Nomor 1. 85 – 93.

- Nina, Gek Ayu dan Surya Dewi Rustariyuni. (2018). Pengaruh Gini Rasio, Pengeluaran Non Makanan, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. *JIEP*. Voume 18. Nomor 2. 121 – 141.
- Nuraini, Emi. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pendidikan terhadap Disparsitas Pendapatan di Wilayah Gerbangkertosusila. *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan*. Volume 5. Nomor 1. 52 – 67.
- Pasodung, Olana Christin dan Jantje J. Tinangon. (2017). Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Transmigrasi (BPMKT) Kabupaten Kepulauan Yepen, Papua. *Jurnal Accountability*. Volume 6. Nomor 1. 72 – 80.
- Pramartha, I. M. A. dan Dwiranda. (2018). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Belanja Modal, dan Investasi Swasta terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*. Volume 22. Nomor 3. 2458 – 2482.
- Prasaja, Mukti Hadi. (2013). Pengaruh Investasi Asing, Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Pengangguran Terdidik Di Jawa Tengah Periode Tahun 1980 – 2011. *Economics Development Analysis Journal*. Volume 2. Nomor 3. 72 – 84.
- Prihastuti, A. H. (2018). Pengaruh Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/kota Riau. *Menara Ekonomi*. Volume 6. Nomor 1. 1 – 8.
- Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2017. Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2018 – 2020 Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR Pulau Sulawesi.
- Rahayu, Kuswati Indra, Michael, dan Siti Amalia. (2017). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Inflasi serta Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal FEB Universitas Mulawarman*. Volume 13. Nomor 1. 39 – 49.
- Rimawan, M. dan Fenny Aryani. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia serta Kemiskinan di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*. Volume 9. Nomor 3. 287 – 295.
- Rusydi, H. Muhammad. (2012). Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Takalar. *Jurnal Ekonomi Balance*. Volume 8. Nomor 2. 152 – 176.

- Sasti, Ida Ayu Tari Purnama dan Made Yenni Latrini. (2019). Pengaruh Alokasi Belanja Operasi dan Belanja Modal pada Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Volume 26. Nomor 2. 1632 – 1659.
- Setiawan, Gusi Bagus Kompiang Putra dan Dewa Nyoman Budiana. (2015). Pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana. Volume 4. Nomor 10. 1276 – 1303.
- Stefandy Dengah, Vecky Rumat, dan Audie Nodie. (2014). Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk terhadap Permintaan Perumahan Kota Manado Tahun 2003 – 2012. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 14. Nomor 3. 71 – 81.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: CV Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2005. Pengantar Teori Ekonomi Makro. Jakarta: Predana Media Grup.
- Sunu, Made Krisna Kalpika dan Made Surya Utama. (2019). Pengaruh Dana Desa terhadap tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Volume 8. Nomor 8. 843 – 872.
- Suparmoko. 2002. Ekonomi Publik: Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Todaro, Michael P. and Stephen C. Smith. 2006. *Economic Development*, 9th Edition, New York: Pearson Addison Wesley.
- Turere, Roy Stevensen Iver, Debby Ch. Rotinsulu, dan Een N. Walewangko. (2018). Efektivitas Dana Desa terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Pineleng Kabupaten Mihasa. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah. Volume 19. Nomor 6. 1 – 18.
- Wijaya, Endra dan Mochamad Firmansyah Roni. (2019). Praktik Pengelolaan Keuangan Desa dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Volume 13. Nomor 2. 165 – 184.
- Zebua, Willman Fogati dan Noval Adib. (2014). Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Barang Dan Jasa, Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 – 2013) . Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2017.

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2018
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2016 – 2017 Buku 2.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2017 – 2018 Buku 2.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2020. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2018 – 2019 Buku 2.

www.bps.go.id (diakses pada 25 Maret 2020)

www.djpk.kemenkeu.go.id (diakses pada 20 April 2020)

www.bi.go.id (diakses pada 3 Mei 2020)

www.berkas.dpr.go.id (diakses pada 3 Mei 2020)

